

Profile Perempuan Indonesia

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebangkitan nasional sebagai awal perjuangan perempuan yang terorganisir, ditandai dengan diselenggarakannya “Kongres Perempuan Indonesia” tingkat nasional pertama kali diadakan di Yogyakarta pada tanggal 22 Desember 1928 yang dihadiri oleh hampir 30 organisasi perempuan. Kongres ini merupakan fondasi pertama gerakan perempuan, dan sebagai upaya konsolidasi dari berbagai organisasi perempuan yang ada.

Setelah kemerdekaan, organisasi perempuan kembali bergerak dalam upaya mendukung para pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Pada jaman Orde Baru, pemerintah menyadari bahwa perempuan perlu diberi peran dalam pembangunan, yang diwadahi dalam tiga organisasi utama, yaitu PKK, Dharma Wanita, dan Dharma Pertiwi, yang menyebar mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah.

Pada akhir dekade pemerintahan Orde Baru, isu gender mulai muncul, sehingga disadari bahwa perempuan harus diberdayakan. Dalam pembangunan, perempuan dan laki-laki harus selalu mendapat akses yang sama, dapat berpartisipasi dan bersama-sama mempunyai kesempatan dalam penetapan keputusan dan akhirnya dapat menikmati manfaat pembangunan secara bersama-sama.

Keadaan perempuan masa kini, berkat inspirasi dari R.A. Kartini, telah banyak mendorong perempuan Indonesia untuk mencapai pendidikan tinggi. Perempuan telah mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk bersekolah. Meskipun demikian, ternyata masih banyak hambatan bagi perempuan untuk mencapai kedudukan atau peningkatan prestasi seperti yang diharapkan, apalagi untuk kedudukan pimpinan atau pengambil keputusan lainnya. Untuk mencapai kedudukan yang setara dengan kedudukan laki-laki, perempuan dituntut untuk mempunyai prestasi yang lebih menonjol, serta harus melalui perjuangan yang sangat berat. Perjuangan perempuan yang berat untuk mencapai suatu kedudukan, disebabkan masih banyak masyarakat Indonesia yang menganut paham patriarki, sehingga menghasilkan keputusan dan sikap yang timpang. Gambaran tentang perempuan diberbagai bidang dalam bentuk data dan informasi sangat diperlukan untuk

menunjang berbagai kebijakan dan program pembangunan, khususnya yang terkait dengan perempuan. Untuk memberikan gambaran kondisi dan posisi perempuan Indonesia saat ini, maka disusun publikasi Profil Perempuan Indonesia Tahun 2013.

1.2. Tujuan

Tujuan publikasi adalah untuk menyajikan data terpilah yang dapat menginformasikan lebih jelas kondisi perempuan dibanding laki laki terkait dengan masalah kependudukan, karakteristik rumah tangga, pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, ketenagakerjaan, akses internet, perumahan, sektor publik, kekerasan terhadap perempuan sosial ekonomi lainnya, dan kesulitan fungsional penyandang disabilitas.

1.3. Sistematika Penyajian

Publikasi ini disajikan dalam sebelas bab. Sebagian besar pembahasan disajikan untuk tingkat nasional, beberapa bidang disajikan sampai tingkat provinsi (dalam Tabel Lampiran). Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini berasal dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2012, Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2012, Survei Industri Mikro dan Kecil Triwulan I Tahun 2012, serta statistik sektoral.

Bab pertama berisi pendahuluan, yang menjelaskan tentang latar belakang penyusunan publikasi, tujuan, dan sistematika penyajiannya.

Bab dua menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan kependudukan, yang terdiri dari komposisi penduduk Indonesia yang disajikan dalam bentuk piramida penduduk dan dibedakan menurut daerah perkotaan maupun perdesaan. Bahasan selanjutnya mengenai sebaran penduduk dan luas wilayahnya, yang menggambarkan kepadatan penduduk dan persebaran penduduk tahun 2012. Dalam bab ini juga diterangkan tentang struktur umur penduduk, yaitu penduduk usia produktif, penduduk usia tidak produktif dan penduduk 45 tahun keatas, yang dibedakan menurut jenis kelamin dan daerah tempat tinggal.

Bab tiga membahas struktur rumah tangga berdasarkan susunan anggota rumah tangga, status ekonomi, karakteristik kepala rumah tangga berdasarkan tingkat pendidikan, status perkawinan, dan status pekerjaan. Pada bab keempat diterangkan tentang profil pendidikan penduduk Indonesia, yang meliputi kemampuan baca tulis, tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, serta rata-rata lama sekolah yang telah dicapai oleh penduduk

berumur 15 tahun keatas. Kondisi kesehatan penduduk dan keluarga berencana di Indonesia dibahas pada bab lima yang meliputi status kesehatan penduduk yang diukur dengan ada tidaknya keluhan kesehatan selama sebulan terakhir. Pada bab ini dijelaskan pula mengenai akses ke pelayanan kesehatan, keluarga berencana, dan usia perkawinan pertama.

Bab enam membahas tentang ketenagakerjaan yang menjelaskan tentang komposisi penduduk usia kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), tingkat pengangguran terbuka (TPT), persentase penduduk yang bekerja berdasarkan tingkat pendidikan, status perkawinan, lapangan pekerjaan utama, status pekerjaan utama, sektor formal dan informal, dan rata-rata upah. Selanjutnya dibahas juga mengenai pengusaha industri mikro dan kecil.

Bab tujuh menyajikan tentang akses penduduk pada informasi dan komunikasi yaitu akses terhadap internet. Bab berikutnya menjelaskan tentang perumahan yang meliputi struktur bangunan rumah, fasilitas rumah, dan akses pada teknologi komunikasi.

Bab sembilan membahas tentang sektor publik, yang menerangkan keterlibatan perempuan di bidang politik (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Selain itu, juga dibahas keterlibatan perempuan disektor publik sebagai pegawai negeri sipil.

Pada bab sepuluh diuraikan tentang keadaan sosial ekonomi lainnya, yang meliputi pelayanan kesehatan gratis, beras murah/raskin, kredit usaha, kepemilikan aset, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, asuransi kesehatan, korban kejahatan, dan bepergian.

Bab sebelas menguraikan tentang penyandang disabilitas diantaranya jenis disabilitas, penyebab utama disabilitas, alat bantu/sarana yang digunakan, hambatan dalam mengakses fasilitas umum, dan program rehabilitasi menurut daerah tempat tinggal dan kelompok umur.

KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA

Dalam kehidupan sehari-hari, istilah rumah tangga sering diartikan sebagai keluarga, padahal keduanya mempunyai arti yang berbeda. Pengertian rumah tangga lebih mengacu pada sisi ekonomi, sedangkan keluarga lebih mengacu pada hubungan kekerabatan, fungsi sosial dan lain sebagainya. Definisi rumah tangga berbeda dengan keluarga, definisi rumah tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan tempat tinggal dan biasa tinggal bersama serta pengelolaan kebutuhan sehari-hari menjadi satu, sedangkan yang dimaksud dengan keluarga adalah sekumpulan orang yang

tinggal dalam satu rumah atau lebih yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain-lain. Sehingga, dalam satu rumah tangga bisa terdiri dari lebih satu keluarga.

3.1. Struktur Rumah Tangga

Data Susenas 2012 menunjukkan bahwa rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan hanya sebesar 14,42 persen. Persentase kepala rumah tangga perempuan di perkotaan dibandingkan perdesaan relatif sama, yaitu sebesar 14,85 persen berbanding 14,00 persen. Struktur sosial yang menempatkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga masih mengakar kuat pada sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari tingginya persentase rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki yaitu 85,58 persen (Gambar 3.1).

Sebagian besar rumah tangga dengan kepala rumah tangga laki-laki, anggota rumah tangganya masih lengkap sehingga perempuan sebagai istri dalam rumah tangga berperan sebagai ibu rumah tangga.

Sumber : BPS RI - Susenas, 2012

Gambar 3.1. Persentase Kepala Rumah Tangga menurut Jenis

Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2012 Menurut provinsi, persentase kepala rumah tangga perempuan tertinggi terdapat di Nusa Tenggara Barat (21,19 persen) dan terendah di Papua (7,83 persen). Menurut daerah tempat tinggal, baik di perkotaan maupun perdesaan persentase kepala rumah tangga perempuan tertinggi juga terdapat di Nusa Tenggara Barat, masing-masing 21,50 persen di perkotaan dan 20,97 persen di perdesaan. Sedangkan yang terendah terdapat di Papua, masing-masing 10,01 persen di perkotaan dan 7,12 persen di perdesaan (Tabel Lampiran 3.1).

3.1.1. Susunan Anggota Rumah Tangga

Banyaknya anggota rumah tangga akan berpengaruh pada biaya hidup yang harus ditanggung oleh rumah tangga. Secara umum, biaya hidup akan lebih kecil pada rumah

tangga dengan jumlah anggota rumah tangga yang sedikit bila dibandingkan dengan rumah tangga yang beranggotakan lebih banyak.

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah yang berkaitan dengan jumlah anggota rumah tangga. Pemerintah menyelenggarakan program KB yang dilandaskan pada Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS). Konsep keluarga kecil yang dimaksudkan dalam program tersebut adalah nucleus family yang terdiri dari ayah, ibu, dan maksimal dua orang anak. Maka secara kuantitatif, konsep keluarga kecil dapat diartikan sebagai keluarga dengan jumlah anggota keluarga maksimal empat orang.

Berdasarkan hasil Susenas 2012, rata-rata anggota rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan adalah 2,80 atau tiga orang, sedangkan kepala rumah tangga laki-laki adalah 4,05 atau 4 orang. Hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa mayoritas kepala rumah tangga perempuan adalah janda yang ditinggal suaminya karena cerai hidup atau cerai mati. Bagi yang cerai hidup, mantan suami mereka berada di rumah tangga lain sehingga anggota berkurang satu dan jumlah anggota rumah tangganya tentu lebih kecil.

Tabel 3.1. Rata-rata Banyaknya ART menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, 2012

Sumber : BPS RI - Susenas, 2012

Pada rumah tangga dengan anggota rumah tangga hanya satu orang, maka anggota rumah tangga tersebut merangkap sebagai kepala rumah tangga. Persentase kepala rumah tangga perempuan dengan anggota rumah tangga yang hanya satu orang sebesar 28,66 persen. Kepala rumah tangga perempuan dengan anggota rumah tangga sebanyak 2-3 orang persentasenya sebesar 41,56 persen paling tinggi dibandingkan dengan yang beranggota 4-5 orang (22,08 persen) dan 6 orang atau lebih (7,69 persen) (Gambar 3.2).

Sumber : BPS RI - Susenas, 2012

Gambar 3.2. Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan menurut Daerah Tempat Tinggal dan Rata-Rata Jumlah Anggota Rumah Tangga, 2012 Di daerah perkotaan sebesar 26,92 persen kepala rumah tangga perempuan yang tinggal sendiri, hal ini dapat disebabkan karena sebagian perempuan sebagai kepala rumah tangga tersebut adalah perempuan muda yang bekerja atau sekolah. Sementara itu di daerah perdesaan, kepala rumah tangga perempuan

yang tinggal sendiri sebesar 30,49 persen, kemungkinan kebanyakan dari mereka adalah perempuan tua.

Persentase kepala rumah tangga laki-laki dengan anggota rumah tangga hanya 1 orang sebesar 3,19 persen, persentase ini lebih rendah dibandingkan dengan kepala rumah tangga perempuan (Gambar 3.3). Membandingkan kepala rumah tangga perempuan dan laki-laki berdasarkan anggota rumah tangganya terlihat bahwa pada rumah tangga dengan anggota rumah tangga 4-5 orang dan 6 orang atau lebih persentase kepala rumah tangga laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan.

Sumber : BPS RI - Susenas, 2012

Gambar 3.3. Persentase Kepala Rumah Tangga menurut JenisKelamin dan Rata-Rata Jumlah Anggota Rumah Tangga, 2012

Pada rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan persentase tertinggi adalah pada rumah tangga dengan anggota 2-3 orang, sedangkan pada rumah tangga dengan kepala rumah tangga laki-laki persentase tertinggi adalah dengan anggota 4-5 orang. Hal ini sesuai dengan rata-rata anggota rumah tangga dengan kepala rumah tangga laki-laki yang lebih banyak bila dibandingkan dengan kepala rumah tangga perempuan. Menurut provinsi untuk persentase tertinggi kepala rumah tangga perempuan dengan anggota hanya 1 orang persentase tertinggi adalah DI Yogyakarta (52,59 persen) sedangkan yang terendah adalah Maluku Utara (16,01 persen). Pada kepala rumah tangga laki-laki, persentase tertinggi di DI Yogyakarta (9,69 persen) sedangkan yang terendah di Gorontalo (1,37 persen) (Tabel Lampiran 3.2.3).

Pada kepala rumah tangga perempuan yang anggotanya 6 orang atau lebih persentase tertinggi di Maluku Utara sebesar 20,04 persen dan terendah di DI Yogyakarta (3,40 persen). Sedangkan pada kepala rumah tangga laki-laki yang anggotanya 6 orang atau lebih persentase tertinggi di Provinsi Maluku (34,94 persen) dan terendah di Provinsi Kalimantan Selatan (10,71 persen) (Tabel Lampiran 3.2.3).

KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

Kesehatan dapat diukur berdasarkan indikator status kesehatan, seperti angka kesakitan. Angka kesakitan (morbidity rate) yaitu penduduk yang mengalami keluhan kesehatan. Upaya peningkatan pelayanan kesehatan dapat dilihat melalui perilaku apakah berobat, keluhan sakit, dan kalau berobat, dimana tempat berobatnya. Salah satu program pemerintah yang telah menghasilkan keberhasilan di Indonesia adalah Program Keluarga Berencana (KB). Program KB berfungsi untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan mengatasi permasalahan kesehatan reproduksi di Indonesia. Indikator yang digunakan meliputi persentase perempuan usia subur yang sedang menggunakan alat/cara KB, persentase perempuan usia subur yang pernah menggunakan alat/cara KB, jenis-jenis alat KB yang digunakan. Sementara itu usia perkawinan pertama dapat mempengaruhi seseorang dalam status pemakaian alat/cara KB. Dalam pembahasan ini akan diuraikan mengenai status kesehatan perempuan, akses ke pelayanan kesehatan, Keluarga Berencana, dan umur perkawinan pertama.

5.1 . Status Kesehatan

Kesehatan perempuan perlu mendapat perhatian khusus karena perempuan mempunyai peran penting dalam melahirkan generasi penerus yang berkualitas. Perempuan berperan mendidik anak dalam suatu rumah tangga. Namun, masih banyak perempuan yang kurang mendapat perhatian terutama di bidang kesehatan.

Secara nasional, persentase perempuan yang mengalami keluhan kesehatan tetapi tidak mengganggu aktifitas sehari-hari selama sebulan terakhir sebesar 29,55 persen. Menurut daerah tempat tinggal, persentase perempuan di perdesaan mengalami keluhan kesehatan hampir sama dengan di perkotaan, masing-masing sebesar 29,54 persen dan 29,55 persen. Jika dibandingkan antara laki-laki dan perempuan, ternyata perempuan lebih tinggi persentasenya mengalami keluhan kesehatan tetapi tidak mengganggu aktifitas fisiknya selama sebulan terakhir (Gambar 5.1).

Menurut provinsi, persentase perempuan yang mengalami keluhan kesehatan tetapi tidak mengganggu aktifitasnya selama sebulan terakhir, yang tertinggi terdapat di Nusa Tenggara Timur sebesar 39,17 persen dan terendah di Maluku Utara sebesar 18,55 persen (Tabel Lampiran 5.1).

Sumber : BPS RI - Susenas, 2012

Gambar 5.1. Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2012

Persentase perempuan yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggu aktifitasnya sehari-hari (angka kesakitan) secara nasional sebesar 14,61 persen. Menurut daerah tempat tinggal, angka kesakitan bagi perempuan di perdesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan sebesar 15,18 persen berbanding 14,04 persen (Gambar 5.2).

Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggu aktifitasnya sehari-hari pada perempuan hampir sama jika dibandingkan dengan laki-laki, yaitu sebesar 14,61 persen berbanding 14,37 persen. Pola yang sama terjadi baik di perkotaan maupun di perdesaan (Gambar 5.2).

Sumber : BPS RI - Susenas, 2012

Gambar 5.2. Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Terganggu Aktifitas Sehari-hari selama Sebulan Terakhir menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2012

Angka kesakitan pada perempuan yang tertinggi terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 22,99 persen, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 10,97 persen (Tabel Lampiran 5.2).

5.2. Akses ke Pelayanan Kesehatan

Akses ke pelayanan kesehatan meliputi ketersediaan dan keterjangkauan ke sarana kesehatan, dan fasilitas atau tempat pelayanan kesehatan. Jika akses ke pelayanan kesehatan sulit, maka pelayanan kesehatan pada masyarakat akan menjadi kurang baik.

Persentase perempuan yang tidak menggunakan akses pelayanan kesehatan akan tetapi mengobati sendiri sebesar 66,81 persen. Menurut daerah tempat tinggal, persentase perempuan yang mengobati sendiri di perkotaan sedikit lebih tinggi dibandingkan di perdesaan yaitu 67,89 persen berbanding 65,73 persen (Gambar 5.3). Persentase perempuan yang mengalami keluhan kesehatan dan mengobati sendiri lebih rendah dibandingkan dengan

laki-laki, yaitu 66,81 persen berbanding 68,65 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat kecenderungan laki-laki yang mengalami keluhan kesehatan lebih banyak mengobati sendiri untuk mengatasi keluhannya bila dibandingkan dengan perempuan (Gambar 5.3).

Sumber : BPS RI - Susenas, 2012

Gambar 5.3. Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Mengobati Sendiri menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2012

Menurut provinsi, perempuan yang mempunyai keluhan kesehatan dan mengobati sendiri paling tinggi terdapat di Kalimantan Selatan sebesar 80,35 persen dan terendah di Bali sebesar 49,71 persen (Tabel Lampiran 5.3).

Persentase perempuan yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan secara nasional sebesar 46,15 persen. Menurut daerah tempat tinggal, perempuan yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan di perkotaan memiliki persentase yang hampir sama dengan di perdesaan. Dibandingkan dengan laki-laki, persentase perempuan yang berobat jalan saat mengalami keluhan kesehatan lebih tinggi, yaitu 46,15 persen berbanding 44,07 persen. Pola yang sama terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan (Gambar 5.4).

Sumber : BPS RI - Susenas, 2012

Gambar 5.4. Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2012

Sebagian besar perempuan yang berobat jalan memanfaatkan fasilitas kesehatan untuk berobat di puskesmas atau puskesmas pembantu (Pustu) sebesar 31,24 persen, kemudian berturut-turut petugas tenaga kesehatan atau tenaga medis sebesar 27,04 persen dan praktek dokter atau poliklinik sebesar 25,05 persen. Jika dibandingkan dengan laki-laki, persentase perempuan lebih tinggi dalam pemanfaatan fasilitas tempat berobat pada rumah sakit swasta, puskesmas/pustu, tenaga medis dan dukun/tabib (Gambar 5.5).

Sumber : BPS RI - Susenas, 2012

Gambar 5.5. Persentase Penduduk yang Berobat Jalan menurut Jenis Kelamin dan Fasilitas/Tempat Berobat, 2012

Perempuan maupun laki-laki di perdesaan lebih cenderung berobat ke tenaga medis. Persentase perempuan di perdesaan yang berobat ke tenaga medis sebesar 37,18 persen dan laki-laki sebesar 36,59 persen. Di perkotaan, perempuan dan laki-laki lebih cenderung berobat ke praktek dokter/poliklinik dengan persentase masing-masing sebesar 32,27 persen dan 35,34 persen (Tabel 5.1).

Tabel 5.1. Persentase Penduduk yang Berobat Jalan menurut Jenis Kelamin, Daerah Tempat Tinggal, dan Fasilitas/Tempat Berobat, 2012

Sumber : BPS RI - Susenas, 2012

Secara nasional, perempuan yang pernah rawat inap selama setahun terakhir sebesar 2,15 persen. Berdasarkan daerah tempat tinggal perempuan yang pernah rawat inap di perkotaan lebih banyak daripada di perdesaan, yaitu 2,42 persen berbanding 1,87 persen. Laki-laki yang pernah rawat inap persentasenya lebih rendah dibandingkan perempuan, baik di perkotaan maupun perdesaan (Gambar 5.6).

Sumber : BPS RI - Susenas, 2012

Gambar 5.6. Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2012.

KEPENDUDUKAN

Penduduk adalah komponen utama dalam pembangunan nasional suatu bangsa yang merupakan sumber daya manusia dalam melakukan dan melaksanakan pembangunan sekaligus sebagai objek atau sasaran pembangunan itu sendiri. Dengan kata lain, penduduk berfungsi sebagai komponen input sekaligus juga sebagai komponen output dalam pembangunan.

Pengelolaan penduduk perlu diarahkan pada pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, dan pengarahan mobilitas sehingga mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang menunjang kegiatan pembangunan. Permasalahan kependudukan seperti jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin harus selalu dipantau perkembangannya.

Penduduk Indonesia menurut hasil Sensus Penduduk (SP) 2010 sebesar 237,64 juta orang. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2012 adalah 245,425 juta jiwa, yang diperoleh dari proyeksi SP 2010.

2.1. Komposisi Penduduk

Keadaan penduduk tahun 2012 menunjukkan bahwa secara nasional penduduk perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Persentase penduduk perempuan sebesar 49,65 persen sedangkan laki-laki sebesar 50,35 persen. Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, baik di perkotaan maupun di perdesaan penduduk perempuan juga lebih sedikit jumlahnya dibandingkan laki-laki.

Perbandingan jumlah penduduk perempuan dengan laki-laki dapat disajikan melalui angka sex ratio. Sex ratio penduduk Indonesia sebesar 101,42. Artinya dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki. Angka sex ratio yang lebih besar dari 100 ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari penduduk perempuan.

Hampir semua provinsi angka sex ratio nya diatas 100 atau penduduk laki-lakinya lebih besar dibandingkan dengan penduduk perempuan. Ada 8 provinsi dengan angka sex ratio dibawah 100 yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan dimana jumlah penduduknya lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki (Tabel Lampiran 2.1).

Distribusi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk, seperti pada Gambar 2.1 s/d 2.3. Gambar tersebut menunjukkan bahwa struktur umur penduduk Indonesia didominasi oleh penduduk muda yang ditandai dengan bagian bawah piramida yang relatif lebar. Secara nasional, frekuensi terbesar untuk penduduk laki-laki berada pada kelompok umur 10-14 tahun sedangkan penduduk perempuan berada di kelompok umur 25-29 tahun (Gambar 2.3).

Bagi sebagian penduduk terutama penduduk usia produktif, masih beranggapan bahwa daerah perkotaan jauh lebih menarik dibandingkan daerah perdesaan, fenomena tersebut tercermin pada Gambar 2.1 dan Gambar 2.2. Persentase penduduk berumur 20-24 dan 25-29 tahun lebih tinggi di daerah perkotaan baik penduduk perempuan (18,46 persen)

maupun penduduk laki-laki (18,16 persen) dibandingkan dengan di daerah perdesaan yang hanya 16,32 persen penduduk perempuan dan 15,85 persen penduduk laki-laki (Tabel Lampiran 2.3). Hal ini sejalan dengan anggapan bahwa kesempatan kerja di perkotaan jauh lebih banyak dibandingkan dengan kesempatan kerja di perdesaan sehingga penduduk usia kerja lebih banyak berada di daerah perkotaan.

Sumber : BPS RI, Susenas 2012

Gambar 2.1. Piramida Penduduk Indonesia, 2012 (Perkotaan)

Sumber : BPS RI - Susenas 2012

Gambar 2.2. Piramida Penduduk Indonesia, 2012 (Perdesaan)

Sumber : BPS RI - Susenas 2012

Gambar 2.3. Piramida Penduduk Indonesia, 2012

(Perkotaan+Perdesaan)

PENDIDIKAN

Keberhasilan pembangunan suatu negara tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. SDM yang berkualitas salah satunya dapat diukur dari kualitas pendidikan, baik secara formal maupun non formal. Pendidikan formal menitikberatkan pada peningkatan mutu pendidikan dengan berbagai cara seperti perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar dan menengah baik umum maupun kejuruan serta perluasan layanan pendidikan tinggi. Demikian pula peningkatan ketersediaan informasi pendidikan, pengembangan budaya baca, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan. Sementara pendidikan non formal bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Pemerintah telah mencanangkan berbagai program untuk meningkatkan pendidikan masyarakat, yaitu dengan memberikan program beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga

kurang mampu, memperbaiki fasilitas pendidikan, menyediakan sarana dan prasarana dalam bidang pendidikan, memperbaiki kurikulum pendidikan serta meningkatkan kualitas, kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik. Program Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) dan program wajib belajar 6 tahun yang diikuti program wajib belajar 9 tahun, serta Program

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan usaha pemerintah untuk mendukung semakin baik dan meningkatnya kualitas pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan diberikan kepada seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan, agar kelak pembangunan dapat dilaksanakan oleh penduduk dengan kualitas pendidikan yang lebih baik tanpa membedakan jenis kelamin. Orang tua yang berpendidikan diharapkan akan menghasilkan anak-anak yang lebih berkualitas. Semakin tinggi pendidikan dan rata-rata lama sekolah bagi perempuan akan berdampak pada kemampuan pola pikir dan tingkat kesejahteraannya. Perempuan yang berkualitas diharapkan juga dapat berpartisipasi dalam pembangunan untuk pembentukan karakter dan peningkatan kesejahteraan bangsa. Bab IV ini akan membahas peran serta perempuan dalam pembangunan khususnya dalam bidang pendidikan serta sampai seberapa jauh pendidikan telah diakses. Indikator pendidikan yang dibahas meliputi angka melek huruf (AMH), pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan rata-rata lama sekolah.

4.1. Kemampuan Baca Tulis

Angka melek huruf didefinisikan sebagai persentase penduduk yang dapat membaca dan menulis huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya. Semakin tinggi angka melek huruf mengindikasikan semakin banyak penduduk yang dapat membaca dan menulis. Kemampuan membaca dan menulis merupakan kemampuan dasar penduduk untuk meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga terbuka kesempatan menambah pengetahuan dan memperoleh informasi.

Sumber : BPS RI - Susenas, 2012

Gambar 4.1. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2012

Hasil Susenas 2012 menunjukkan bahwa angka melek huruf perempuan berumur 15 tahun ke atas sebesar 90,64 persen. Angka melek huruf tersebut lebih rendah bila

dibandingkan dengan angka melek huruf laki-laki yaitu 95,87 persen pada kelompok umur yang sama. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan membaca dan menulis perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki (Gambar 4.1).

Menurut provinsi, angka melek huruf penduduk berumur 15 tahun ke atas mempunyai pola yang sama, yaitu persentase penduduk perempuan yang melek huruf lebih rendah dibandingkan laki-laki kecuali Gorontalo, dimana angka melek huruf perempuan sebesar 95,41 persen dan laki-laki sebesar 95,03 persen. Sulawesi Utara dan DKI Jakarta merupakan provinsi dengan persentase penduduk perempuan yang melek hurufnya lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya masing-masing sebesar 98,66 persen dan 98,48 persen, sedangkan yang paling rendah adalah Papua sebesar 58,87 persen (Tabel Lampiran 4.1). Gambar 4.2 menunjukkan bahwa secara nasional persentase perempuan yang melek huruf pada kelompok umur 15-24 tahun cukup tinggi, yaitu 99,68 persen di perkotaan dan 98,32 persen di perdesaan. Jika dilihat menurut jenis kelamin, persentase angka melek huruf perempuan pada kelompok umur yang sama lebih rendah 0,06 persen dibandingkan laki-laki, yaitu perempuan 99,04 persen dan laki-laki 99,10 persen.

Sumber : BPS RI - Susenas, 2012

Gambar 4.2. Persentase Penduduk Berumur 15 - 24 Tahun yang Melek Huruf menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2012

Menurut provinsi, persentase tertinggi perempuan yang melek huruf pada kelompok umur 15-24 tahun terdapat di Banten sebesar 99,95 persen dan terendah di Papua sebesar 72,24 persen. Sementara itu, persentase tertinggi laki-laki yang melek huruf terdapat di DKI Jakarta sebesar 99,80 persen dan terendah di Papua sebesar 81,22 persen (Tabel Lampiran 4.2). Perkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan

Sumber : BPS RI - Susenas, 2012

Gambar 4.3. Persentase Penduduk Berumur 60 Tahun ke Atas yang

Melek Huruf menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2012 Gambar 4.3 menunjukkan persentase perempuan yang melek huruf pada kelompok umur 60 tahun ke atas sebesar 58,68 persen. Berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase perempuan berumur 60 tahun ke atas yang melek huruf di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan, yaitu

68,92 persen berbanding 49,98 persen. Dibandingkan dengan perempuan, persentase laki-laki berumur 60 tahun ke atas yang melek huruf lebih tinggi, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Menurut provinsi, persentase perempuan berumur 60 tahun ke atas yang melek huruf lebih rendah dibandingkan laki-laki. Angka melek huruf perempuan berumur 60 tahun ke atas yang tertinggi terdapat di Sulawesi Utara sebesar 93,92 persen dan yang terendah di Nusa Tenggara Barat sebesar 28,46 persen (Tabel Lampiran 4.3).

4.2. Tingkat Pendidikan

4.2.1. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Gambaran mengenai kualitas sumber daya manusia salah satunya dapat dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan akan semakin baik kualitas penduduknya yang juga menggambarkan kemajuan suatu daerah. Pada Gambar 4.4 terlihat bahwa pada kelompok umur 15 tahun ke atas, perempuan yang menamatkan pendidikan pada jenjang SD/ sederajat ke bawah, persentasenya lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Sebaliknya untuk jenjang pendidikan SMP/ sederajat hingga Perguruan Tinggi ternyata persentase perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Keadaan ini menunjukkan bahwa pendidikan penduduk perempuan pada kelompok 15 tahun ke atas masih dibawah pendidikan penduduk laki-laki. Hal ini juga menggambarkan bahwa kualitas pendidikan perempuan masih lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.

Sumber : BPS RI - Susenas, 2012

Gambar 4.4. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2012

Pada Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa perempuan yang menamatkan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah (SMP/ sederajat) hingga jenjang pendidikan tertinggi yaitu Perguruan Tinggi (PT), di perkotaan persentasenya lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan. Sementara pada jenjang pendidikan SD/ sederajat ke bawah, persentase perempuan di perkotaan lebih rendah dibandingkan di perdesaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan bagi perempuan di perkotaan sudah jauh lebih baik daripada perempuan di perdesaan. Hal ini karena didukung sarana dan prasarana pendidikan di perkotaan yang sudah

memadai, selain itu juga kesadaran masyarakat perkotaan akan pentingnya pendidikan jauh lebih baik bila dibandingkan dengan penduduk perempuan di perdesaan.

Tabel 4.1. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2012

Sumber : BPS RI - Susenas, 2012

Menurut jenis kelamin, penduduk yang menamatkan pendidikan SD/ sederajat ke bawah di perkotaan persentase perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, sedangkan untuk pendidikan SM/ sederajat hingga Perguruan Tinggi, persentase perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Di perdesaan, perempuan yang tidak/ belum pernah sekolah dan belum tamat SD persentasenya lebih tinggi dibandingkan laki-laki, sedangkan pada jenjang pendidikan SD/ sederajat hingga SM/ sederajat persentase perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Secara nasional, persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang tidak/ belum pernah sekolah perempuan (8,30 persen) dan laki-laki (3,45 persen). Berdasarkan provinsi, persentase tertinggi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang tidak/ belum pernah sekolah berada di Papua baik perempuan (40,36 persen) maupun laki-laki (27,29 persen). Pendidikan penduduk yang belum tamat SD, tamat SD/ sederajat, SMP/ sederajat dan Perguruan Tinggi baik untuk laki-laki maupun perempuan berada pada provinsi yang sama yaitu belum tamat SD di Gorontalo, tamat SD/ sederajat di Kalimantan Tengah, SMP/ sederajat di Sumatera Utara, dan Perguruan Tinggi di DKI Jakarta. Sementara itu, persentase tertinggi pada jenjang pendidikan SM/ sederajat untuk perempuan di Kepulauan Riau (43,95 persen) dan laki-laki di DKI Jakarta (46,11 persen) (Tabel Lampiran 4.4.1 dan 4.4.2). Berdasarkan kondisi tersebut, perlu adanya intervensi kebijakan dan program peningkatan kualitas pendidikan khususnya di wilayah Indonesia Timur.

Pada kelompok umur 15-59 tahun, persentase perempuan yang menamatkan pendidikan pada jenjang SD/ sederajat ke bawah lebih tinggi dibandingkan laki-laki sedangkan pada jenjang SM/ sederajat persentase perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Sementara itu, persentase perempuan dan laki-laki yang menamatkan pendidikan pada jenjang SMP/ Sederajat dan Perguruan Tinggi hampir sama (Gambar 4.5).

KETENAGAKERJAAN

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang penting untuk dibahas karena sebagai salah satu indikator pembangunan ekonomi. Kondisi ketenagakerjaan yang baik berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Permasalahan ketenagakerjaan yang masih menjadi hambatan di Indonesia diantaranya adalah tingginya tingkat pengangguran, rendahnya kualitas tenaga kerja, pekerja dibawah umur dan lain sebagainya. Terkait dengan kualitas tenaga kerja, partisipasi penduduk dalam dunia kerja harus didukung oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Hal ini karena tuntutan pada tenaga kerja tidak hanya sebatas kemampuan untuk bekerja, namun dihadapkan pula pada kemampuan untuk berkompetisi sesuai dengan kondisi kerja dan persaingan lapangan kerja. Pembahasan mengenai ketenagakerjaan menjadi lebih menarik apabila dilihat dari partisipasi laki-laki maupun perempuan didalam dunia kerja. Seiring dengan perkembangan zaman, jumlah perempuan yang bekerja mulai meningkat karena adanya tuntutan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, sehingga perempuan sebagai tenaga kerja juga merupakan isu yang menarik untuk dibahas. Karakteristik perempuan sebagai tenaga kerja, kualitas SDM-nya, dan kedudukannya dibandingkan dengan laki-laki merupakan hal yang perlu dijawab untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi ketenagakerjaan di Indonesia dari sudut pandang yang lebih menyeluruh.

Data mengenai ketenagakerjaan yang digunakan dalam publikasi ini diperoleh dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) bulan Agustus tahun 2012 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Keterangan yang dikumpulkan dari hasil Sakernas merupakan keterangan perorangan untuk setiap anggota rumah tangga berumur 10 tahun ke atas, namun uraian yang disajikan dalam publikasi ini mencakup informasi ketenagakerjaan bagi penduduk berumur 15 tahun ke atas.

Pembahasan dalam bab ketenagakerjaan ini mencakup komposisi penduduk usia kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Penduduk yang bekerja menurut karakteristiknya antara lain tingkat pendidikan, status perkawinan, lapangan pekerjaan, status pekerjaan, rata-rata upah dan sektor formal dan informal, serta membahas mengenai pengusaha industri mikro dan kecil.

6.1. Komposisi Penduduk Usia Kerja

Penduduk usia kerja dibagi kedalam dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang dilakukannya, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri atas penduduk yang bekerja dan penduduk yang menganggur atau pengangguran terbuka, sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk yang sekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya.

Secara total, persentase perempuan yang bekerja sebesar 47,91 persen. Persentase perempuan yang bekerja di perkotaan sebesar 44,74 persen, sedangkan di perdesaan sebesar 51,10 persen. Sementara itu persentase total perempuan sebagai pengangguran terbuka sebesar 3,48 persen, dimana persentase perempuan yang menganggur di perkotaan sebesar 3,93 persen dan di perdesaan sebesar 3,02 persen (Gambar 6.1).

Sumber : BPS RI - Sakernas Agustus 2012

Gambar 6.1. Persentase Perempuan Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kegiatan selama Seminggu yang Lalu dan Daerah Tempat Tinggal, 2012

Persentase perempuan yang mengurus rumah tangga secara total adalah 36,97 persen, dilihat menurut daerah tempat tinggal persentase perempuan yang mengurus rumah tangga di perkotaan sebesar 38,52 persen, sedangkan di perdesaan sebesar 35,41 persen (Gambar 6.1). Selanjutnya bila dilihat perbandingan kegiatan selama seminggu yang lalu antara perempuan dan laki-laki, persentase tertinggi baik untuk perempuan maupun laki-laki adalah pada kelompok yang bekerja. Hal yang menarik adalah pada perbedaan persentase yang cukup besar, dimana persentase perempuan yang bekerja hanya sebesar 47,91 persen sedangkan laki-laki sebesar 79,57 persen. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki yang bekerja lebih dominan dibanding yang melakukan kegiatan lain seperti mengurus rumah tangga yaitu hanya sebesar 1,63 persen, sedangkan perempuan yang bekerja tidak terlalu dominan karena persentase perempuan yang mengurus rumah tangga juga cukup tinggi yaitu sebesar 36,97 persen (Tabel 6.1). Penduduk laki-laki umumnya merupakan tulang punggung keluarga sehingga mereka yang seharusnya bekerja, sedangkan pekerjaan rumah tangga lebih dibebankan pada kaum perempuan.

Perbandingan antar provinsi menunjukkan bahwa persentase tertinggi untuk perempuan yang bekerja terdapat di Bali sebesar 68,49 persen, sedangkan yang terendah di

Sulawesi Utara sebesar 36,30 persen. Hal ini menunjukkan bahwa budaya kerja bagi perempuan di Bali cukup tinggi (Tabel Lampiran 6.1.3).

Tabel 6.1. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kegiatan Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin, 2012

Sumber : BPS RI - Sakernas Agustus 2012

6.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan ukuran yang dapat menggambarkan tingginya jumlah perempuan yang bekerja. TPAK adalah proporsi penduduk angkatan kerja, yaitu mereka yang bekerja dan menganggur terhadap penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Berdasarkan daerah tempat tinggal, TPAK perempuan di perkotaan sebesar 48,67 persen sedangkan di perdesaan yaitu sebesar 54,13 persen. Perbandingan antara TPAK perempuan dan laki-laki menunjukkan perbedaan yang cukup besar, TPAK perempuan yaitu sebesar 51,39 persen lebih rendah bila dibandingkan dengan TPAK lakilaki yaitu sebesar 84,42 persen (Gambar 6.2). Selanjutnya berdasarkan TPAK di masing-masing Provinsi, terlihat bahwa TPAK perempuan tertinggi adalah di Provinsi Bali sebesar 69,89 persen, sedangkan TPAK laki-laki tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar 88,36 persen (Tabel Lampiran 6.2).

Sumber : BPS RI - Sakernas Agustus 2012

Gambar 6.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2012

6.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan ukuran yang umum digunakan untuk menunjukkan tingkat pengangguran. TPT adalah persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk dalam kelompok pengangguran terbuka. Berdasarkan konsep Sakernas, pengangguran terbuka adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha, atau mereka yang sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja walaupun sudah memiliki pekerjaan, dan mereka yang tidak mencari pekerjaan karena sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

Sumber : BPS RI - Sakernas Agustus 2012

Gambar 6.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2012

TPT perempuan secara total sebesar 6,77 persen. Berdasarkan daerah tempat tinggal, TPT perempuan di perkotaan sebesar 8,07 lebih tinggi dibandingkan di perdesaan yaitu sebesar 5,59 persen. Selanjutnya hasil Sakernas tahun 2012 menunjukkan secara total TPT perempuan lebih tinggi dibanding TPT laki-laki, yaitu 6,77 persen berbanding 5,75 persen (Gambar 6.3). Hal ini menunjukkan masih lebih rendahnya daya saing perempuan untuk masuk ke pasar kerja dibandingkan dengan laki-laki. Perbandingan antar provinsi menunjukkan bahwa TPT perempuan di Sulawesi Utara merupakan yang tertinggi yaitu 12,14 persen, sedangkan yang terendah di Bali sebesar 2,00 persen. Perbedaan tersebut menandakan masih adanya kesenjangan antar provinsi dalam hal penyerapan perempuan sebagai tenaga kerja (Tabel Lampiran 6.3).

6.4. Penduduk yang Bekerja

Konsep bekerja menurut Sakernas adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit satu jam (tidak terputus) selama seminggu terakhir. Kegiatan tersebut termasuk juga kegiatan pekerja tak dibayar yang terlibat dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. Penduduk yang bekerja di Indonesia memiliki berbagai macam karakteristik yang dapat memberikan gambaran mengenai kualitasnya.

Pembahasan berikut adalah mengenai penduduk yang bekerja ditinjau dari berbagai karakteristik, diantaranya adalah tingkat pendidikan, status perkawinan, lapangan pekerjaan utama, status pekerjaan utama serta sektor formal dan informal. Selanjutnya, rata-rata upah penduduk bekerja juga menarik untuk dibahas dari berbagai segi seperti daerah tempat tinggal, tingkat pendidikan, dan lapangan pekerjaan.

AKSES INTERNET

Berdasarkan konsep Susenas, yang dimaksud dengan mengakses internet adalah apabila seseorang meluangkan waktu untuk mengakses internet, sehingga ia dapat memanfaatkan atau menikmati fasilitas internet seperti mencari literatur/referensi,

mencari/mengirim informasi/berita, komunikasi, email/chatting, dll. Pada bab ini akan dibahas akses internet pada penduduk berumur 5 tahun ke atas, 5-17 tahun, 7-15 tahun, 15-24 tahun, 15-64 tahun dan 65 tahun ke atas termasuk media/lokasi mengakses internet.

7.1. Akses Internet Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas

Secara nasional, persentase perempuan berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet sebesar 13,06 persen, sedangkan laki-lakinya sebesar 16,32 persen. Persentase perempuan di perkotaan yang mengakses internet lebih tinggi dibandingkan di perdesaan, yaitu 20,39 persen berbanding 5,69 persen. Persentase laki-laki berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet di perkotaan sebesar 25,67 persen sedangkan di perdesaan 6,93 persen (Gambar 7.1).

Pada tingkat provinsi, persentase perempuan berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet paling tinggi terdapat di DKI Jakarta, Kepulauan Riau dan DI Yogyakarta masing-masing sebesar 31,58 persen, 23,37 persen dan 22,27 persen. Akses internet terendah bagi perempuan berumur 5 tahun ke atas terdapat di Papua sebesar 4,51 persen. (Tabel Lampiran 7.1).

Sumber : BPS RI - Susenas, 2012

Gambar 7.1. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet selama 3 Bulan Terakhir menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2012

Menurut media/lokasi mengakses internet, persentase perempuan berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet paling tinggi adalah handphone yaitu sebesar 59,39 persen, kemudian di warnet sebesar 36,72 persen. Di daerah perkotaan, persentase perempuan berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet melalui handphone, warnet dan sekolah lebih rendah dibandingkan di perdesaan. Akses internet melalui handphone di perkotaan sebesar 59,15 persen dan di perdesaan sebesar 60,24 persen, akses internet di warnet untuk daerah perkotaan sebesar 34,96 persen dan perdesaan sebesar 43,04 persen, sedangkan akses internet melalui sekolah di perkotaan sebesar 14,64 persen dan di perdesaan 20,73 persen. Sedangkan persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet paling rendah untuk perempuan adalah di kantor (12,15 persen), dan untuk laki-laki di sekolah (11,74 persen) (Tabel 7.1).

Persentase laki-laki berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet paling tinggi juga melalui handphone yaitu sebesar 56,75 persen, kemudian di warnet sebesar 38,00 persen. Sama halnya dengan perempuan, persentase laki-laki di perkotaan lebih rendah dibandingkan perdesaan untuk akses di handphone, warnet, dan sekolah yaitu 55,61 persen berbanding 61,00 persen untuk akses di handphone, 37,31 persen berbanding 40,57 persen untuk akses di warnet, dan akses di sekolah sebesar 10,84 persen berbanding 15,09 persen (Tabel 7.1).

Tabel 7.1. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet selama 3 Bulan Terakhir menurut Jenis Kelamin, Daerah Tempat Tinggal, dan Media/Lokasi Mengakses Internet, 2012

Sumber : BPS RI - Susenas, 2012

7.2. Akses Internet Penduduk Berumur 18-24 Tahun

Secara nasional, persentase perempuan berumur 18-24 tahun yang mengakses internet sebesar 30,19 persen dengan proporsi yang Secara nasional, persentase perempuan berumur 18-24 tahun yang mengakses internet paling tinggi melalui handphone yaitu 71,71 persen, sedangkan terendah di kantor yaitu 7,99 persen. Menurut daerah tempat tinggal, persentase perempuan berumur 18-24 tahun di perdesaan yang mengakses internet melalui warnet maupun handphone lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Akses internet melalui warnet di perkotaan sebesar 37,15 persen sedangkan di perdesaan sebesar 41,96 persen, akses internet dengan handphone untuk daerah perkotaan sebesar 71,69 persen dan perdesaan sebesar 71,76 persen (Tabel 7.2). Tabel 7.2. Persentase Penduduk Berumur 18-24 Tahun yang Mengakses Internet selama 3 Bulan Terakhir menurut Jenis Kelamin, Daerah Tempat Tinggal, dan Media/Lokasi Mengakses Internet, 2012

Sumber : BPS RI - Susenas, 2012

Persentase laki-laki berumur 18-24 tahun yang mengakses internet paling tinggi juga melalui handphone sebesar 68,15 persen, dimana persentase di perkotaan lebih rendah dibandingkan perdesaan yaitu 67,26 persen berbanding 70,87 persen. Sementara itu, akses internet terendah adalah di kantor sebesar 6,61 persen, dimana persentase di perkotaan sebesar 7,75 persen lebih tinggi dibandingkan di perdesaan sebesar 3,11 persen (Tabel 7.2).

PERUMAHAN

Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia selain sandang, pangan, dan kesehatan. Pentingnya rumah dapat dilihat dari fungsinya sebagai tempat tinggal, tempat istirahat, tempat berlindung dari hujan dan panas dan tempat berlangsungnya proses sosialisasi bagi semua anggota rumah tangga. Keberadaan rumah dan fasilitasnya dapat mempengaruhi tingkat kesehatan anggota rumah tangga sekaligus menunjukkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Semakin baik rumah dan fasilitas yang dimiliki, dapat diasumsikan semakin baik pula tingkat kesehatan dan tingkat kesejahteraan penghuninya.

Beberapa fasilitas rumah yang dapat mencerminkan tingkat kesehatan dan tingkat kesejahteraan yang akan dibahas pada bab ini adalah struktur bangunan rumah (luas lantai, jenis lantai, jenis atap, dan jenis dinding), fasilitas rumah (sumber penerangan, sumber air minum, dan tempat pembuangan kotoran akhir), dan akses pada teknologi komunikasi. Di dalam pembahasan ini dibedakan menurut kepala rumah tangga perempuan dan kepala rumah tangga laki-laki.

8.1. Struktur Bangunan Rumah

Struktur bangunan rumah dapat mempengaruhi tingkat kesehatan. Rumah yang tidak sehat dapat menjadi media penularan penyakit bagi anggota rumah tangga bahkan masyarakat sekitar.

Beberapa indikator untuk menilai kualitas bangunan rumah adalah luas lantai rumah, jenis lantai, jenis atap, dan jenis dinding. Luas lantai rumah menentukan tingkat kesehatan penghuninya karena luas lantai yang sempit dapat mengurangi konsumsi oksigen dan mempercepat proses penularan penyakit.

Luas lantai rumah berkaitan dengan kepadatan hunian atau rata-rata luas ruang untuk tiap anggota keluarga. Berdasarkan publikasi Statistik Perumahan Hasil Sensus Penduduk 2012, ukuran luas lantai yang ideal digunakan per orang minimal adalah 9 m².

Persentase kepala rumah tangga perempuan yang menempati rumah dengan luas lantai minimal 9 m² per kapita sebesar 88,43 persen. Menurut daerah tempat tinggal, kepala rumah tangga perempuan yang menempati rumah dengan luas lantai minimal 9 m² per kapita di perdesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan, yaitu 90,47 persen berbanding 86,48

persen. Kepala rumah tangga laki-laki yang menempati rumah dengan luas lantai minimal 9 m² per kapita, lebih rendah persentasenya dibandingkan kepala rumah tangga perempuan, baik di perkotaan maupun di perdesaan (Gambar 8.1).

Menurut provinsi, persentase tertinggi kepala rumah tangga perempuan yang menempati rumah dengan luas lantai kurang dari 9 m² per kapita terdapat di Papua (42,67 persen) dan terendah di Jawa Tengah (3,26) (Tabel Lampiran 8.1.1).

Sumber : BPS RI - Susenas, 2012

Gambar 8.1. Persentase Kepala Rumah Tangga yang Menempati Rumah dengan Luas Lantai ≥ 9 m² per Kapita menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2012

Jenis lantai rumah dapat mempengaruhi kondisi kesehatan anggota rumah tangga. Berdasarkan publikasi Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan, lantai bukan tanah dianggap lebih baik dibandingkan lantai tanah sehingga rumah tangga yang menggunakan lantai tanah dianggap menempati rumah tidak layak huni. Persentase kepala rumah tangga perempuan yang menempati rumah berlantai bukan tanah sebesar 87,56 persen. Menurut daerah tempat tinggal, kepala rumah tangga perempuan yang menempati rumah berlantai bukan tanah di perkotaan (94,85 persen) lebih tinggi dibandingkan di perdesaan (79,95 persen) (Gambar 8.2).

Sumber : BPS RI - Susenas, 2012

Gambar 8.2. Persentase Kepala Rumah Tangga yang Menempati Rumah Berlantai Bukan Tanah menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2012

Persentase kepala rumah tangga laki-laki yang menempati rumah berlantai bukan tanah lebih tinggi dibandingkan dengan kepala rumah tangga perempuan. Persentase kepala rumah tangga laki-laki yang menempati rumah berlantai bukan tanah sebesar 90,54 persen, dimana di perkotaan persentasenya lebih tinggi dibandingkan di perdesaan, yaitu 96,40 persen berbanding 84,83 persen (Gambar 8.2). Menurut provinsi, persentase kepala rumah tangga perempuan yang menempati rumah berlantai bukan tanah sudah di atas 80 persen, kecuali Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Persentase kepala rumah tangga perempuan yang menempati rumah berlantai bukan tanah dengan persentase tertinggi terdapat di Kepulauan Riau sebesar 99,80 persen dan terendah di Nusa Tenggara Timur

sebesar 55,91 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa provinsi Nusa Tenggara Timur dengan kepala rumah tangga perempuan menempati rumah berlantai tanah sebesar 44,09 persen (Tabel Lampiran 8.2.1).

Jenis atap dapat digunakan untuk melihat kualitas rumah. Salah satu fungsi atap adalah untuk melindungi penghuni rumah dari cuaca panas dan hujan. Menurut publikasi Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan, salah satu syarat rumah layak huni adalah rumah yang menggunakan atap layak (atap tidak mudah bocor) yaitu atap yang terbuat dari beton, genteng, sirap, seng, dan asbes. Persentase kepala rumah tangga perempuan yang menempati rumah dengan atap layak sebesar 97,19 persen. Menurut daerah tempat tinggal, kepala rumah tangga perempuan yang menempati rumah dengan atap layak di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan, yaitu 99,32 persen berbanding 94,97 persen. Pola yang sama terjadi pada kepala rumah tangga laki-laki (Gambar 8.3).

Bila dilihat pada tingkat provinsi, kepala rumah tangga perempuan yang telah menempati rumah dengan atap layak sudah lebih dari 80 persen, kecuali Nusa Tenggara Timur (79,48 persen), Sulawesi Barat (77,02 persen), dan Papua (64,88 persen). Provinsi dengan kepala rumah tangga perempuan yang menempati rumah dengan atap layak paling tinggi terdapat di Jawa Timur sebesar 99,93 persen (Tabel Lampiran 8.3.1).

Sumber : BPS RI - Susenas, 2012

Gambar 8.3. Persentase Kepala Rumah Tangga yang Menempati Rumah dengan Atap Layak menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2012

Selain penggunaan jenis atap, kualitas rumah juga dipengaruhi oleh jenis dinding yang digunakan. Menurut publikasi Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan, penggunaan dinding dikatakan memenuhi syarat rumah layak huni jika dinding tersebut tidak lembab dan tidak tembus angin. Jenis dinding yang memenuhi syarat rumah layak huni adalah dinding permanen yaitu dinding yang terbuat dari tembok. Gambar 8.4 menunjukkan persentase kepala rumah tangga yang menempati rumah berdinding permanen. Dari gambar tersebut terlihat bahwa persentase kepala rumah tangga perempuan yang menempati rumah berdinding permanen sebesar 65,58 persen. Menurut daerah tempat tinggal, persentase kepala rumah tangga perempuan yang menempati rumah berdinding permanen di perkotaan (81,14 persen) dua kali lipatnya dibandingkan di perdesaan (49,33 persen).

Sumber : BPS RI - Susenas, 2012

Gambar 8.4. Persentase Kepala Rumah Tangga yang Menempati Rumah dengan Dinding Permanen menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2012

Persentase kepala rumah tangga laki-laki yang menempati rumah berdinding permanen sebesar 68,95 persen, dimana untuk kepala rumah tangga laki-laki di perkotaan sebesar 83,67 persen dan di perdesaan sebesar 54,61 persen. Angka ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan kepala rumah tangga perempuan yang menempati rumah berdinding permanen (Gambar 8.4).

Menurut provinsi, persentase tertinggi kepala rumah tangga perempuan yang menggunakan dinding permanen terdapat di Bali sebesar 94,18 persen. Penggunaan dinding permanen pada rumah tangga yang dikepalai perempuan masih jarang ditemui di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, masing-masing hanya sebesar 16,30 persen dan 19,46 persen. Sebagian besar rumah tangga di kedua provinsi tersebut menggunakan kayu sebagai dinding rumah (Tabel Lampiran 8.4.1).

Berdasarkan kondisi struktur rumah diatas masih ada provinsi dengan kondisi yang kurang layak huni, untuk itu perlu menjadi perhatian pemerintah dalam upaya mendorong kebijakan dan program perumahan layak huni.

8.2. Fasilitas Rumah

Ketersediaan fasilitas rumah menentukan tingkat kenyamanan penghuninya, tingkat kesehatan, dan kemudahan dalam beraktifitas. Fasilitas yang penting agar rumah menjadi nyaman dan sehat untuk dijadikan tempat tinggal antara lain tersedianya sumber penerangan listrik, air minum bersih, dan jamban sendiri dengan tangki septik/SPAL.

Sumber penerangan yang dapat digunakan sebagai fasilitas penerangan diantaranya listrik (PLN dan non PLN), petromak, aladin, pelita, sentir, dan obor. Berdasarkan publikasi Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan, listrik merupakan sarana yang cukup penting untuk rumah tangga yaitu sebagai sumber penerangan dan merupakan kebutuhan penting masyarakat.

Kepala rumah tangga perempuan yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan sebesar 95,77 persen, dimana untuk kepala rumah tangga perempuan yang tinggal di perkotaan persentasenya lebih tinggi dibandingkan di perdesaan, yaitu 99,41 persen berbanding 91,98 persen. Sementara itu, kepala rumah tangga laki-laki yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan, baik di perkotaan maupun di perdesaan persentasenya hampir sama dengan kepala rumah tangga perempuan (Gambar 8.5).

Menurut provinsi, hampir semua kepala rumah tangga perempuan di DKI Jakarta menempati rumah dengan sumber penerangan listrik, yaitu sebesar 99,73 persen. Persentase terendah kepala rumah tangga perempuan yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan terdapat di Papua sebesar 47,78 persen (Tabel Lampiran 8.5).

Sumber : BPS RI - Susenas, 2012

Gambar 8.5. Persentase Kepala Rumah Tangga yang Menggunakan

Listrik sebagai Sumber Penerangan menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2012 Fasilitas lain dari rumah adalah air minum bersih. Sumber air minum untuk kategori air bersih yaitu air ledeng, air hujan, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung. Khusus untuk sumber air minum sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung harus berjarak 10 meter atau lebih dari tempat penampungan tinja/limbah/kotoran terdekat.

Sumber : BPS RI - Susenas, 2012

Gambar 8.6. Persentase Kepala Rumah Tangga yang Menggunakan Air Minum Bersih menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2012

Persentase kepala rumah tangga perempuan yang menggunakan air minum bersih sebesar 41,96 persen. Penggunaan air minum bersih pada kepala rumah tangga perempuan di perkotaan lebih rendah dibandingkan di perdesaan, yaitu 39,69 persen berbanding 44,34 persen. Pola yang sama terjadi pada kepala rumah tangga laki-laki baik di perkotaan maupun di perdesaan (Gambar 8.6).

Menurut provinsi, persentase penggunaan air minum bersih dengan kepala rumah tangga perempuan paling tinggi terdapat di Kalimantan Barat sebesar 56,38 persen. Persentase

penggunaan air minum bersih dengan kepala rumah tangga perempuan paling rendah terdapat di Kepulauan Riau sebesar 17,80 persen (Tabel Lampiran 8.6).

Sistem pembuangan kotoran atau air besar manusia erat kaitannya dengan kondisi kesehatan anggota rumah tangga dan lingkungan. Tempat pembuangan kotoran ini tidak terlepas dari aspek kepemilikan terhadap sarana yang digunakan, terutama dikaitkan dengan tanggung jawab dalam pemeliharaan dan kebersihan sarana tersebut. Menurut publikasi Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan, tempat penampungan yang paling memenuhi syarat kesehatan adalah tangki septik atau Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL). Dengan demikian, fasilitas rumah yang berkaitan dengan sistem pembuangan kotoran adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik/SPAL. Persentase kepala rumah tangga perempuan yang menggunakan jamban sendiri dengan tangki septik/SPAL sebesar 48,73 persen. Menurut daerah tempat tinggal, kepala rumah tangga perempuan yang menggunakan jamban sendiri dengan tangki septik di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan, yaitu 61,23 persen berbanding 35,68 persen. Persentase kepala rumah tangga laki-laki yang menggunakan jamban sendiri dengan tangki septik/SPAL lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan baik di perkotaan maupun di perdesaan (Gambar 8.7).

Sumber : BPS RI - Susenas, 2012

Gambar 8.7. Persentase Kepala Rumah Tangga yang Menggunakan Jamban Sendiri dengan Tangki Septik/SPAL menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2012

Menurut provinsi, persentase tertinggi kepala rumah tangga perempuan yang menggunakan jamban sendiri dengan tangki septik/SPAL terdapat di Kepulauan Bangka Belitung sebesar 73,47 persen. Sementara itu, persentase terendah kepala rumah tangga perempuan yang menggunakan jamban sendiri dengan tangki septik/SPAL terdapat di Nusa Tenggara Timur sebesar 22,85 persen (Tabel Lampiran 8.7).

SEKTOR PUBLIK

Hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan diatur oleh negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan juga ditegaskan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Dengan

demikian, perempuan diberikan kebebasan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan di semua bidang dan sektor. Keterlibatan perempuan dalam sektor publik dari waktu ke waktu menunjukkan peningkatan, hal ini tampak pada partisipasi perempuan yang menjadi anggota badan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif serta di partai politik.

9.1. Politik dan Legislatif

Peningkatan jumlah perempuan terpilih menjadi wakil rakyat periode 2009-2014 tidak hanya menunjukkan bertambahnya minat perempuan masuk dalam dunia politik, namun dapat juga mengindikasikan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang peran perempuan dalam dunia politik adalah penting dan perlu didukung. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa parpol harus memenuhi kuota 30 persen bagi perempuan dalam politik terutama di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun pada kenyataannya keterlibatan perempuan dalam dunia politik belum mencapai 30 persen, padahal dengan adanya UU tersebut dapat dijadikan momentum yang tepat bagi perempuan untuk dapat mengangkat harkat dan martabatnya serta menunjukkan bahwa perempuan mempunyai potensi yang sama dengan laki-laki.

Kurangnya kepercayaan diri perempuan berkompetisi dengan pria dalam dunia politik mengakibatkan keterkaitan perempuan dalam badan Legislatif masih jauh dari memadai, padahal pemilih mayoritas dalam pemilu di Indonesia adalah perempuan, hal itu dapat terlihat pada data anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)-DPRRI periode 2009-2014 per 16 Juli 2012, dimana perempuan yang menjadi anggota DPR sebanyak 101 orang dari 560 anggota DPR (18 persen). Sementara itu perempuan yang menjadi anggota MPR sebanyak 138 orang atau sekitar 20 persen dari total anggota MPR (692 orang).

Partai politik merupakan salah satu wadah dimana perempuan bisa berkiprah dalam bidang politik atau dengan kata lain untuk meningkatkan pemberdayaan politik perempuan, partai politik di Indonesia juga merupakan jenjang untuk seseorang menjadi anggota parlemen. Berdasarkan partai politik, jumlah perempuan yang menjadi anggota legislatif banyak yang berasal dari Partai Demokrat (36 orang), hal ini dapat dimaklumi mengingat Partai Demokrat merupakan partai pemenang pemilu periode 2009-2014. Secara persentase, jumlah anggota perempuan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan yang paling tinggi persentasenya yaitu sekitar 25 persen, sedangkan yang terendah terdapat pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebesar 3,51 persen. Selanjutnya untuk Dewan Perwakilan Daerah

(DPD), terdapat 28 persen perempuan dan 72 persen laki-laki. Komposisi perempuan di Badan Legislatif ini paling tinggi dibandingkan di badan legislatif lainnya.

Sumber : MPR – RI

Gambar 9.1. Persentase Anggota MPR, DPR, dan DPD menurut Jenis

Kelamin

9.2. Eksekutif

Sejak era reformasi di Indonesia, perempuan mendapat peluang yang besar untuk menduduki jabatan politik yang penting di negara ini, seperti Indonesia pernah dipimpin oleh seorang presiden perempuan. Dalam menjalankan roda pemerintahan, seorang presiden dibantu oleh sejumlah menteri yang merupakan orang pilihan dan memiliki keahlian khusus. Dari 34 (tiga puluh empat) kementerian yang dibentuk presiden, terdapat satu kementerian yang khusus menangani perempuan, yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dipimpin oleh perempuan.

Sumber : Website SETKAB

Gambar 9.2. Banyaknya Menteri pada Kementerian di Kabinet Indonesia Bersatu 2009-2014 Jilid II menurut Jenis Kelamin, 2012

Sehingga hanya 4 (empat) kementerian yang dipimpin oleh perempuan, yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kepala Bappenas), Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA).

Dari seluruh provinsi di Indonesia hanya ada satu provinsi yang dipimpin oleh seorang perempuan yaitu Provinsi Banten yang terpilih sejak 2007 sampai dengan saat ini. Pada tahun 2011 di tingkat kabupaten/kota, hanya terdapat 16 orang bupati dan walikota perempuan dari 497 kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Jumlah ini terlihat lebih banyak dibandingkan dengan perempuan yang menjadi gubernur. Namun secara persentase, perempuan yang menjadi gubernur relatif sama dibandingkan perempuan yang menjadi bupati/walikota, yaitu 3,03 persen berbanding 3,22 persen.

Di tingkat desa/kelurahan, umumnya kepala desa/lurah adalah laki-laki. Perempuan yang menjadi kepala desa/lurah hanya sebesar 5 persen. Tingkat pendidikan tidak mempengaruhi seseorang menjadi kepala desa/lurah. Namun demikian sebagian besar kepala desa/lurah, baik laki-laki maupun perempuan berpendidikan minimal SMA atau SMTA.

9.3. Yudikatif

Lembaga yudikatif yang terdiri dari Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga yang belum responsif gender. Pada lembaga yudikatif ini, hanya Mahkamah Konstitusi yang memiliki pemimpin perempuan dari sembilan pimpinan MK.

Sumber : Website Mahkamah Agung

Gambar 9.3. Banyaknya Pimpinan pada Mahkamah Agung menurut Jenis Kelamin, 2012

Sumber : Website KPK

Gambar 9.4. Banyaknya Pimpinan KPK menurut Jenis Kelamin, 2012

Sumber : Website Mahkamah Konstitusi

Gambar 9.5. Banyaknya Pimpinan Mahkamah Konstitusi menurut Jenis Kelamin, 2012

Sumber : Website Komisi Yudisial

Gambar 9.6. Banyaknya Pimpinan Komisi Yudisial menurut Jenis

Kelamin, 2012

9.4. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Presiden dibantu oleh aparat yang terdapat dalam kementerian dan lembaga pemerintah lainnya. Salah satu aparat pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebagai PNS, baik laki-laki dan perempuan dapat berperan dalam menjalankan program-program pemerintah. Jika partisipasi perempuan dibuka seluas-luasnya sebagai PNS maka program-program pemerintah dapat diarahkan pada pencapaian kesetaraan gender.

Sumber : Website BKN

Gambar 9.7. Persentase PNS yang Menduduki Jabatan Eselon I-V menurut Jenis Kelamin, 2013

Jumlah pegawai negeri sipil pada Januari 2013 sebanyak 4.467.982 orang, 47,79 persen diantaranya adalah perempuan. Peran perempuan dalam pemerintahan dapat juga dilihat dari banyaknya perempuan yang menjadi pejabat struktural mulai dari eselon V (terendah) sampai dengan eselon I (tertinggi). Secara umum jumlah pejabat struktural di lingkungan PNS hanya lima persen (238 462 orang pejabat struktural), dengan jumlah PNS laki-laki yang menjabat struktural sebanyak 170 766 orang dan perempuan sebanyak 67 696 orang. Meskipun perempuan sudah berperan sebagai PNS, namun belum banyak yang berada pada posisi pengambil keputusan. Sebagian besar pejabat struktural didominasi oleh kaum laki-laki, sedangkan persentase perempuan yang menjadi pejabat struktural hanya 28 persen. Semakin tinggi jabatan semakin kecil persentase perempuan yang menduduki jabatan tersebut. Dari 652 pejabat eselon I hanya terdapat 107 orang perempuan (16,41 persen), sedangkan jumlah perempuan yang menduduki jabatan eselon II, III, IV, dan V masing-masing sebanyak 1 490 orang (12,84 persen), 10 868 orang (19,58 persen), 53 991 orang (32,38 persen) dan 1 240 orang (31,12 persen). Berdasarkan kelompok umur, persentase PNS perempuan tertinggi pada kelompok umur 46-50 tahun yaitu 19,93 persen diikuti kelompok umur 41-45 tahun (17,74 persen) dan 31-35 tahun (14,60 persen). Sama halnya dengan PNS laki-laki, persentase tertinggi PNS laki-laki juga berada pada kelompok umur 46-50 tahun yaitu sebesar 22,60 persen tetapi selanjutnya pada kelompok umur 51-55 tahun (19,92 persen) dan 41-45 tahun (17,59 persen).

Tabel 9.1. Persentase Jumlah PNS menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2013

Sumber: Website BKN

Tabel 9.2. Persentase Jumlah PNS menurut Tingkat Pendidikan Akhir dan Jenis Kelamin, 2013

Sumber: Website BKN

KEADAAN SOSIAL EKONOMI LAINNYA

Pada bab ini diulas mengenai program-program pemerintah berupa bantuan sosial ekonomi yang diberikan pada rumah tangga seperti Jamkesmas, raskin, dan kredit usaha yang dicanangkan untuk membantu masyarakat, khususnya pada rumah tangga miskin. Selain itu juga diulas mengenai kepemilikan aset, biaya hidup, dan asuransi kesehatan. Gambaran mengenai adanya rumah tangga yang menjadi korban kejahatan dan yang melakukan bepergian juga diulas pada bab ini.

10.1. Pelayanan Kesehatan Gratis

Program penanggulangan kemiskinan di bidang kesehatan salah satunya adalah memberikan jaminan bagi keluarga miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Pemerintah mendistribusikan kartu atau surat-surat kepada rumah tangga miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, seperti kartu Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat), kartu sehat, surat miskin, dan lainnya.

Secara nasional, terdapat 19,25 persen kepala rumah tangga perempuan pernah mendapatkan pelayanan kesehatan gratis selama enam bulan terakhir. Menurut daerah tempat tinggal, kepala rumah tangga perempuan yang mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di perkotaan lebih rendah dibandingkan di perdesaan, yaitu 17,50 persen berbanding 21,08 persen. Jika dibandingkan dengan kepala rumah tangga perempuan, kepala rumah tangga laki-laki yang mendapatkan pelayanan kesehatan gratis lebih rendah, baik di perkotaan maupun di perdesaan (Gambar 10.1).

Sumber: BPS RI - Susenas, 2012

Gambar 10.1. Persentase Kepala Rumah Tangga yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Gratis selama 6 Bulan Terakhir menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2012

Menurut provinsi, persentase kepala rumah tangga perempuan maupun laki-laki yang mendapatkan pelayanan kesehatan gratis yang tertinggi terdapat di Aceh, masing-masing sebesar 48,13 persen dan 46,59 persen dan terendah di DKI Jakarta, masing-masing sebesar 8,98 persen dan 6,48 persen (Tabel Lampiran 10.1).

Tabel 10.1. Persentase Kepala Rumah Tangga yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Gratis selama Enam Bulan Terakhir menurut Jenis Kartu/Surat yang Digunakan, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal, 2012

Sumber: BPS RI - Susenas, 2012

Tabel 10.1 menunjukkan persentase kepala rumah tangga yang mendapatkan pelayanan kesehatan gratis selama enam bulan terakhir menurut jenis kartu/surat yang digunakan. Pada tabel tersebut terlihat bahwa persentase kepala rumah tangga perempuan yang mendapatkan pelayanan kesehatan gratis paling banyak menggunakan Jamkesmas sebesar 63,43 persen. Namun demikian yang menggunakan jamkesmas di perdesaan lebih banyak dibandingkan di perkotaan, baik kepala rumah tangga perempuan (67,41%) maupun laki-laki (61,27%), sedangkan di daerah perkotaan dan perdesaan masih sedikit yang menggunakan kartu sehat 3,99% (perempuan), 4,85% (laki-laki) dan surat miskin 6,48% (perempuan), 6,14% (laki-laki) dalam pelayanan kesehatan gratis. Kategori “lainnya” juga menunjukkan persentase yang cukup besar yaitu 26,11 persen, hal ini disebabkan kategori lainnya mencakup pelayanan kesehatan gratis yang didapat dari asuransi kesehatan/Askes, jamsostek, dan jaminan dari kantor bagi pegawai swasta.

PENYANDANG DISABILITAS

Menurut WHO, disabilitas adalah suatu ketidakmampuan melaksanakan suatu aktifitas/kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal, yang disebabkan oleh kondisi kehilangan atau ketidakmampuan baik psikologis, fisiologis maupun kelainan struktur atau fungsi anatomis. Disabilitas adalah ketidakmampuan melaksanakan suatu aktivitas/kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal yang disebabkan oleh kondisi impairment (kehilangan atau ketidakmampuan) yang berhubungan dengan usia dan masyarakat (Glosarium Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 2009). Dahulu istilah disabilitas dikenal dengan sebutan penyandang cacat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) tidak lagi menggunakan istilah penyandang cacat, diganti dengan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, dimana ketika ia berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menyulitkannya untuk berpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesamaan hak.

Berdasarkan hasil Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) 2012, persentase perempuan penyandang disabilitas secara nasional sebesar 2,55 persen terhadap total penduduk. Menurut daerah tempat tinggal, perempuan penyandang disabilitas di perkotaan relatif lebih rendah dibandingkan di perdesaan, yaitu 2,28 persen berbanding 2,81 persen. Jika dibandingkan dengan perempuan, persentase laki-laki penyandang disabilitas relatif lebih rendah, baik di perkotaan maupun di perdesaan (Gambar 11.1).

Sumber : BPS RI - Susenas, 2012

Gambar 11.1. Persentase Penyandang Disabilitas menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2012

Menurut provinsi, persentase tertinggi perempuan penyandang disabilitas terdapat di Gorontalo sebesar 4,75 persen sedangkan laki-laki di Bengkulu sebesar 4,20 persen. Sementara itu, persentase terendah baik untuk perempuan maupun laki-laki penyandang disabilitas terdapat di Papua, masing-masing sebesar 0,86 persen dan 1,21 persen (Tabel Lampiran 11.1).

11.1. Jenis Disabilitas

Jenis disabilitas atau gangguan fungsi/keterbatasan antara lain kesulitan membaca, kesulitan mendengar, berbicara tidak lancar, kesulitan memahami/hilang ingatan/gangguan jiwa, lambat dalam belajar/memahami pelajaran, keterbatasan berjalan, keterbatasan bergerak, kesulitan mengambil barang kecil menggunakan jari.

Perempuan penyandang disabilitas paling banyak mengalami gangguan melihat sebesar 29,79 persen. Berdasarkan daerah tempat tinggal, perempuan penyandang disabilitas di perkotaan dan perdesaan hampir sama untuk setiap jenis disabilitas. Sama halnya seperti perempuan, persentase laki-laki penyandang disabilitas paling banyak adalah mengalami gangguan melihat sebesar 29,45 persen. Persentase laki-laki penyandang disabilitas menurut daerah tempat tinggal dan jenis disabilitasnya hampir sama baik di perkotaan maupun di perdesaan kecuali yang mengalami gangguan berjalan/naik tangga, persentase di perdesaan sedikit lebih tinggi dibandingkan di perkotaan yaitu sebesar 13,22 persen berbanding 10,22 persen (Tabel 11.1).

Tabel 11.1 Persentase Penyandang Disabilitas menurut Jenis Disabilitas, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal, 2012

Sumber: BPS RI - Susenas, 2012

Persentase perempuan penyandang disabilitas ganda (mengalami gangguan fungsi/keterbatasan lebih dari satu jenis) sebesar 43,13 persen, dimana di perkotaan sebesar 44,28 persen dan di perdesaan sebesar 42,21 persen. Dibandingkan dengan perempuan, persentase laki-laki penyandang disabilitas ganda lebih rendah baik di perkotaan maupun di perdesaan (Gambar 11.2)

Sumber : BPS RI - Susenas, 2012

Gambar 11.2. Persentase Penyandang Disabilitas Ganda menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2012

11.2. Penyebab Utama Disabilitas

Berdasarkan definisi yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial Tahun 2005, penyebab disabilitas dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu disabilitas akibat kecelakaan (korban peperangan, kerusuhan, kecelakaan kerja/industri, kecelakaan lalu lintas serta kecelakaan lainnya), disabilitas sejak lahir atau ketika dalam kandungan, termasuk yang mengidap disabilitas akibat penyakit keturunan, dan disabilitas yang disebabkan oleh penyakit (penyakit polio, penyakit kelamin, penyakit TBC, penyakit kusta, diabetes dll).

Hasil Susenas 2012 menunjukkan bahwa secara umum penyebab disabilitas perempuan adalah karena penyakit lainnya sebesar 64,98 persen, kemudian bawaan sejak lahir sebesar 14,56 persen, dan kecelakaan/bencana alam sebesar 13,64 persen. Menurut daerah tempat tinggal, perempuan penyandang disabilitas di perdesaan yang disebabkan oleh bawaan sejak lahir, kekurangan gizi, dan tekanan hidup/stres lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Seperti halnya perempuan, laki-laki penyandang disabilitas paling banyak disebabkan oleh penyakit lainnya sebesar 53,79 persen, sedangkan penyebab lainnya adalah kecelakaan/bencana alam sebesar 19,45 persen, dan bawaan sejak lahir sebesar 19,09 persen.

Tabel 11.2. Persentase Penyandang Disabilitas menurut Penyebab Disabilitas, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal, 2012

Sumber: BPS RI - Susenas, 2012

11.3. Alat Bantu/Sarana yang Digunakan

Berdasarkan Glosarium Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial, yang dimaksud dengan alat bantu adalah alat yang dipergunakan penyandang disabilitas (cacat) untuk dapat meminimalkan hambatan yang dialami sebagai akibat kecacatannya agar dapat meningkatkan mobilitas, komunikasi, dan interaksi dalam kehidupan bermasyarakat secara wajar, sekaligus untuk meminimalisasi kerusakan/kecacatan lanjutan.

Sumber : BPS RI - Susenas, 2012

Gambar 11.3. Persentase Penyandang Disabilitas yang Menggunakan Alat Bantu menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2012

Persentase perempuan penyandang disabilitas yang menggunakan alat bantu sebesar 16,70 persen. Menurut daerah tempat tinggal, perempuan penyandang disabilitas yang menggunakan alat bantu di perdesaan persentasenya lebih rendah dibandingkan di perkotaan, yaitu sebesar 13,00 persen berbanding 21,29 persen. Jika dibandingkan dengan perempuan, laki-laki penyandang disabilitas yang menggunakan alat bantu memiliki persentase yang lebih tinggi (Gambar 11.3).

Menurut provinsi, persentase perempuan penyandang disabilitas yang menggunakan alat bantu paling tinggi terdapat di Kalimantan Timur sebesar 41,75 persen dan yang paling rendah terdapat di Sulawesi Barat sebesar 0,59 persen. Sementara itu, persentase laki-laki penyandang disabilitas yang menggunakan alat bantu paling tinggi terdapat di Kepulauan Riau sebesar 35,55 persen dan paling rendah terdapat di Sulawesi Barat sebesar 4,59 persen (Tabel Lampiran 11.2). Alat bantu yang digunakan oleh penyandang disabilitas berupa kursi roda, tongkat penyangga, kaki palsu, tangan palsu, tongkat putih, alat bantu dengar, template braille, komputer suara dan lainnya. Alat bantu yang paling banyak digunakan oleh perempuan penyandang disabilitas adalah alat bantu lainnya sebesar 10,62 persen, tongkat penyangga sebesar 3,79 persen dan kursi roda sebesar 1,47 persen. Sama halnya dengan perempuan, alat bantu yang paling banyak digunakan oleh laki-laki penyandang disabilitas adalah alat bantu lainnya sebesar 10,49 persen, tongkat penyangga sebesar 4,86 persen, dan kursi roda sebesar 1,64 persen (Tabel 11.3).

Tabel 11.3 Persentase Penyandang Disabilitas menurut Alat bantu/Sarana yang Digunakan, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal, 2012